



Pendidikan Pesantren

Sholihun Likulli Zaman Wa Makan

Abstract

Indonesian education today has been far from the goal tafaqquh fi ad-deen. Instead various educational institutions became one machine controller protégé life and led them to become man who stuck by worldly materialism and spirituality increasingly away from the soul, not to mention the Islamic world. Not a bit of boarding school education that has been washed away global education bring their students to be human beings with bodies without mind, without critical power and creativity. Everything has been programmed, uniform and standardized. Therefore, Boarding schools must restore educational purposes; tafaqquh Fi ad-din to print generation of intelligent and virtuous character.

Pendidikan Indonesia hari ini telah jauh dari tujuan tafaqquh fi ad-diin. Sebaliknya berbagai lembaga pendidikan justru menjadi satu mesin pengendali kehidupan anak didik dan menggiring mereka untuk menjadi insan yang terpasung oleh materialisme duniawi dan kian jauh dari ruh spiritualitas, tak terkecuali dunia pesantren. Tidak sedikit pendidikan pesantren yang telah jauh terbawa arus pendidikan global yang membawa anak didiknya untuk menjadi manusia-manusia dengan tubuh-tubuh tanpa pikiran, tanpa daya kritis dan kreativitas. Semuanya telah diprogram, diseragamkan dan distandardisasi. Oleh karenanya, Pesantren harus mengembalikan tujuan pendidikan; tafaqquh fi ad-din untuk mencetak generasi yang cerdas dan berbudi pekerti.

Kata kunci: Pendidikan, Pesantren, Global

Oleh:

Tina Siska Hardiansyah

Kepala Bidang Penerbitan LKP2M Periode 2011

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab

tina_siska@gmail.com

Pendahuluan

Membincangkan sistem pendidikan yang sukses dalam aplikasi dan aktualisasinya, maka yang muncul di otak mayoritas warga Negara Indonesia adalah Barat, bukan Mesir, Maroko atau Negara Timur lainnya. Sehingga tidak heran, jika model pendidikan Indonesia di bangku sekolah, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) hingga ke perguruan tinggi

(PT) menerapkan format pendidikan barat. Segalanya mengacu pada standardisasi pendidikan yang telah dipatenkan oleh Negara Barat, baik pendidikan yang berada di bawah naungan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) maupun pendidikan yang dinaungi Kementerian Agama (Kemenag). Kita masih sedikit memaklumi ketika itu adalah pendidikan nasional di bawah naungan Mendiknas, akan tetapi model ini

tidak relevan untuk pendidikan madrasah yang hakikatnya berakar dari pendidikan pesantren.

Sebagai contoh konkret, saat ini untuk menjadi seorang guru di lingkup madrasah harus memenuhi persyaratan minimal lulusan S-1 untuk tingkat madrasah aliyah (MA), D-3 untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan D-2 untuk tingkat madrasah ibtidaiyah (MI)¹. Padahal, itu semua adalah produk Negara Barat. Para pejabat di Kemenag telah lupa akan sejarah pendidikan Indonesia pra-kolonialisme, di mana pendidikan kita berawal dari *halaqoh-halaqoh* kecil dengan metode *sorogan*. Untuk menjadi seorang guru madrasah tidak membutuhkan *title* seperti S-1, D-3 dan sejenisnya karena pada dasarnya madrasah dibangun atas adanya keinginan bersama untuk *bertafaqquh fi al-din*² dan karena strata dalam pendidikan seperti D-1, D-2, S-1 hingga S3 merupakan produk kolonial yang sengaja dihadirkan untuk menggeser pendidikan pesantren Indonesia yang selama ini diperjuangkan oleh para *alim ulama'* kita dan dianggap membahayakan pemerintahan. Belajar pun tidak dibatasi usia (*long live education*), tidak membutuhkan biaya yang membumbung tinggi (komersialisasi pendidikan) seperti yang terjadi saat ini dan tidak ada tujuan lain melainkan mencari ilmu untuk kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari demi kemaslahatan umat.

Namun realita pendidikan madrasah di Indonesia hari ini berkata lain. Banyak dari pesantren telah jauh menyimpang dari rel pendidikan yang bertujuan *tafaqquh fi al-din*. Pesantren dan madrasah pun tidak lepas dari

¹ Departemen Agama RI. *Desain Pengembangan Madrasah*. Hal: 61. 2005. Jakarta

² *Ibid*, hal: 23

pengaruh konsep pendidikan Barat. Dalam hal ini Mubarok: 2009 mengklasifikasikan tipologi pendidikan pesantren ke dalam empat kelompok. Pertama, pesantren yang tetap konsisten seperti pesantren zaman dulu, disebut *salafi*. Kedua, pesantren yang memadukan sistem lama dengan sistem pendidikan sekolah, disebut pesantren *modern*. Ketiga, pesantren yang sebenarnya hanya sekolah biasa namun siswanya diasramakan 24 jam. Keempat, pesantren yang tidak mengajarkan ilmu agama karena semangat keagamaan telah dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan kehidupan sehari-hari di asrama.

Terlepas dari beragam corak pendidikannya, formalisasi pesantren menuntut adanya kepatuhan terhadap peraturan yang diseragamkan. Itu berarti sebuah kelaziman untuk tunduk dan mengekor pada konsep pendidikan barat, hingga lambat laun tanpa disadari pendidikan pesantren kehilangan jati dirinya. Pembelajaran pesantren tidak lagi menganut sistem belajar-tuntas namun sistem kejar kurikulum sebagaimana sekolah formal: idealnya sekolah dasar diselesaikan 6 tahun, sekolah menengah pertama dan atas masing-masing 3 tahun, seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), seorang mahasiswa diwajibkan untuk mengambil 144-160 satuan kredit semester (sks) yang diambil selama delapan sampai dua belas semester. Pada jenjang Magister (S2), seorang mahasiswa harus menyelesaikan 39 sampai 50 sks selama kurun waktu empat sampai sepuluh semester, dan untuk jenjang doktoral (S3)

harus menempuh sekitar 79 sampai 88 sks dalam jangka waktu delapan sampai empat belas semester.³

Padahal asal-muasal sistem pendidikan pesantren mensyaratkan ketuntasan santri dalam mempelajari suatu bidang tertentu dalam kurun waktu yang tidak terbatas. Bisa saja seorang santri menguasai bidang tauhid satu atau dua bulan dan lekas beranjak ke keilmuan lainnya. Sebaliknya, bisa saja lama menggeluti bidang tersebut namun tidak juga tuntas. Maka ia masih harus terus mendalaminya hingga mencapai pemahaman yang tuntas. Sistem belajar-tuntas tersebut, sedikit demi sedikit telah bergeser mengikuti standardisasi pendidikan formal.

Paradigma masyarakat kita telah digiring dan diindoktrinasi sedemikian rupa hingga mereka berasumsi bahwa jika tidak sekolah maka kita akan bodoh, biadab (tidak memiliki adab), menjadi pengangguran, terbelakang, konservatif, primitif, miskin dan buta huruf.⁴ Padahal jika melihat pada fakta sejarah, sistem sekolah baru muncul sejak adanya politik etis di tahun 1900-an. Jauh sebelum itu, masyarakat kita telah sedemikian maju dan berperadaban. Ini terbukti dengan banyaknya bangunan berupa prasasti, candi, arca yang begitu megah, yang secara nalar tidak mungkin diciptakan oleh orang-orang bodoh dan primitif.

Di abad 1 M masyarakat nusantara telah mampu menciptakan kalender sendiri, yakni kalender pranoto mongso dan kalender pakuwon. Di abad 6 M mereka

mampu membuat huruf sendiri; ho, no, co, ro, ko, dst... Juga berbagai mahakarya seperti Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular yang mengajak pada toleransi antar agama, terutama antar agama Hindu-Siwa dan Buddha⁵, Kakawin Nagarakretagama karya Mpu Prapanca yang menjelaskan keadaan di keraton Majapahit dalam masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, raja agung di tanah Jawa dan juga Nusantara, dan masih banyak lagi karya-karya pribumi yang tidak mungkin karya-karya tersebut dituliskan oleh orang yang buta huruf.

Kaum kolonialisme telah berhasil menanamkan asumsi-asumsi tersebut hingga mengakar kuat di benak masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sehingga sebagai kaum pribumi alias inlander, masyarakat kita merasa menjadi masyarakat yang kerdil di mata dunia. Di samping itu, penggiringan yang dilakukan kaum kapitalis membawa kita menjadi konsumen dalam segala aspek kehidupan, tak terkecuali dunia pendidikan. Dan ini menjadi satu pertanda bahwa bangsa kita tengah mengalami masa kemunduran. Hal ini sebagaimana disampaikan Ibnu Khaldun dikutip oleh Ahmad Mubarok dalam bukunya Psikologi Islam Kearifan & Kecerdasan Hidup bahwa jatuh bangunnya bangsa ditandai oleh lahirnya tiga generasi⁶. Pertama, generasi pendobrak. Kedua, generasi pembangun. Ketiga, generasi penikmat alias konsumen, dan hari ini masyarakat kita tengah menduduki posisi generasi ketiga, yakni generasi yang hanya asyik menikmati pembangunan. Anehnya lagi,

³ Situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

⁴ Disampaikan oleh K. Ng. H Agus Sunyoto dalam diskusi rutinan, Jum'at, 13 September 2013 di Pesantren Global

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Kakawin_Sutasoma diakses pada Senin, 23 September 2013 pukul 12:16 WIB

⁶ Prof. Dr. Achmad Mubarok, MA. *Psikologi Islam Kearifan & Kecerdasan Hidup*. 2009. Jakarta: The IIIT dan WAP. Hal: 243

mereka bukan hanya kurang terpelajar tetapi justru kebanyakan kelompok terpelajar.

Potret Pendidikan Indonesia Masa Kini

Pendidikan wajib 9 tahun, sesuai undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Inilah pendidikan negera kita hari ini, yang pada praktiknya justru menggiring pada kondisi 'yang kaya terus sekolah, yang miskin gigit jari'. Apa yang salah dengan pendidikan kita dewasa ini? Sekurang-kurangnya, menurut Achmad Mubarok⁷ ada Sembilan poin kekeliruan pendidikan nasional kita selama ini:

- a) Pengelolaan pendidikan di masa lampau terlalu berlebihan pada aspek kognitif, mengabaikan dimensi lainnya sehingga buahnya melahirkan generasi *split personality*, kepribadian yang pecah.
- b) Pendidikan terlalu sentralistik sehingga melahirkan generasi yang memandang Jakarta (ibukota) sebagai satu-satunya tumpuan harapan tanpa mampu melihat peluang dan potensi besar di daerah masing-masing.
- c) Gagal melahirkan lulusan SDM yang siap berkompetisi di dunia global.
- d) Pendidikan gagal meletakkan sendi-sendi dasar pembangunan masyarakat yang berdisiplin.
- e) Pengelolaan pendidikan selama ini mengabaikan demokratisasi dan hak-hak asasi manusia. Sebagai contoh, pada masa orde baru guru negeri di sekolah lingkungan diknas

mencapai 1 guru untuk 14 siswa, namun di madrasah (di bawah naungan depag) 1 guru negeri untuk 2000 siswa. Anggaran pendidikan SMA negeri mencapai Rp. 400.000,-/siswa/tahun sementara madrasah aliyah hanya Rp. 4.000,-/siswa/tahun.

- f) Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan SDM dikalahkan oleh uniformitas yang sangat sentralistik, sehingga kreatifitas dalam pengembangan pendidikan menjadi tidak tumbuh.
- g) Sentralisasi pendidikan nasional mengakibatkan tumpulnya gagasan-gagasan otonomi daerah
- h) Pendidikan nasional kurang menghargai kemajemukan budaya, bertentangan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.
- i) Muatan indoktrinasi nasionalisme dan patriotism yang dipaksakan melalui PPKN terlalu kering hingga kontraproduktif.

Sembilan poin di atas melahirkan buah yang pahit⁸:

- a) Generasi muda yang langitnya rendah, tidak memiliki imajinasi idealistik
- b) Angkatan kerja yang tidak bisa berkompetisi dalam lapangan kerja pasar global
- c) Birokrasi yang lamban, korup dan tidak kreatif
- d) Masyarakat luas mudah bertindak anarkis

⁷ Ibid. hal: 244

⁸ Ibid. hal:245

- e) Cendekiawan yang hipokrit
- f) Pelaku ekonomi yang tida siap bermain fair
- g) Hutang luar negeri yang tak tertanggungkan
- h) Merajalelanya tokoh pemimpin yang bermoral rendah
- i) Pemimpin daerah yang kebingungan. Bupati daerah minus tetap berharap kucuran dari pusat, bupati daerah plus menghambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak strategis.

Kondisi pendidikan di atas tidak hanya terjadi di tingkatan SD hingga SMA namun juga di pendidikan perguruan tinggi. Lebih parah, (Yasraf, 2005) menyebut pendidikan tinggi kita sebagai tempat industrialisasi, institusi total, panopticon, dan tempat lahirnya kekerasan simbol.

Pendidikan tinggi sebagai industrialisasi pendidikan. Hal ini meminjam istilah Hans Magnus Enzensberger di dalam *Dreamers of Absolute*, bahwa pendidikan tinggi menjadi sebuah industri besar pikiran yang dilengkapi dengan mesin-mesin pikiran yang memproduksi pikiran-pikiran seragam, tingkah laku yang seragam. Segala sesuatunya diseragamkan, mulai dari pakaian, nama, kurikulum, metode, buku ajar bahkan tingkah laku sehari-hari. Dari sini tercipta sebuah totalitas keseragaman masyarakat yang tidak memberi tempat bagi perbedaan, keunikan dan pluralitas. Di samping adanya fenomena penyeragaman dalam segala hal, Adorno dan Horkheimer juga melihat bahwa pendidikan dijadikan sebagai alat ekonomi, di mana pemaksaan pendidikan tinggi hanya untuk melahirkan lulusan yang hanya siap bekerja di dunia

industri. Sistem pendidikan kita memaksa seseorang untuk menjadi pekerja; sekrup di dalam sebuah mesin industrialisasi.

Pendidikan kita juga dikatakan sebagai institusi total, yakni sebuah institusi yang mengendalikan seluruh waktu, tenaga dan pikiran mahasiswa. Semua digiring dan digembleng untuk tetap berada dalam area yang telah 'mereka' ciptakan. Hubungan sosial mereka dibatasi sedemikian rupa, cara berpikir, jalan pikiran, bahkan ideologi dikendalikan agar tak mampu berpikir kritis. Mahasiswa dididik ibarat manusia robot di mana ia dikendalikan oleh sebuah remot yang dikendalikan oleh 'mereka' yang sarat akan kepentingan. Sistem totalitarianisme yang demikian akan menghasilkan manusia-manusia dengan tubuh-tubuh tanpa pikiran, tanpa daya kritis dan kreativitas, oleh karena kesemuanya telah diprogram, diseragamkan dan distandardisasi.

Pendidikan tinggi seperti yang dijelaskan di atas, menurut Michael Foucault akan menyebabkannya menjadi sebuah panopticon, yakni sebuah situasi antara yang diawasi dan yang mengawasi, antara yang dikontrol dan orang yang mengontrol. Di sini mahasiswa seolah telah mati, karena ibarat boneka, yang hanya bergerak saat digerakkan, tanpa memiliki kreativitas murni dari dalam dirinya. Padahal sebagai makhluk unik, manusia memiliki segudang potensi dalam dirinya yang jika masing-masing individu mengaktualisasikannya sesuai potensi yang dimiliki akan tercipta kekayaan karya anak bangsa.

Masih menurut Yasraf, bahwa sistem pendidikan nasional kita hari ini merupakan satu penghambat terbentuknya sebuah iklim pendidikan yang dinamis, produktif dan

kreatif. Mengapa? Pertama, pendidikan kita bersifat hegemonik, yakni ia dijadikan alat untuk mendominasi, menanamkan pengaruh, dan menumbuhkan kepatuhan semata. Kedua, bersifat sentralistik, yakni pendidikan diorganisir berdasar pada sebuah model pengendalian dan manajemen memusat. Sentralisasi terjadi hampir di segala bidang: landasan ideologi, visi, misi, tujuan, struktur, kurikulum, metode pengajaran, dan mekanisme pendidikan.

Ketiga, bersifat monologis, yakni pendidikan dengan model komunikasi satu arah, di mana pengajar dan pejabat/birokrat pendidikan ibarat raja, di mana segala yang disampaikannya haruslah diamini dan dibenarkan, maka yang terjadi adalah pengalihan pengetahuan atau reproduksi pengetahuan semata. Keempat, bersifat reaktif, yakni pendidikan kita diarahkan dan dilaksanakan untuk merespon kebutuhan pasar semata. Kelima, bersifat formalistik, yakni pendidikan yang mengarahkan anak didiknya hanya untuk memperoleh gelar dan kerja. Pendidikan tidak membekali anak didiknya dengan sikap mandiri dan kreatif. Dengan sistem pendidikan yang demikian dapat dipastikan Negara ini akan melahirkan generasi penikmat saja, bukan pembangun apalagi pendobrak.

Pendidikan Masa Depan

Di dunia global yang terus berkembang, jika berbagai bentuk industrialisasi pendidikan, panopticon, dan kekerasan simbol tetap dipertahankan, niscaya bangsa ini tidak akan pernah mengalami kemajuan karena sumber daya manusia yang akan dilahirkan dari rahim pendidikan kita adalah bayi-bayi

yang tak dapat berpikir kritis, dialektis, lateral dan argumentatif. Padahal, empat poin tersebut merupakan sebuah pondasi bagi tumbuh kembangnya intelektualitas.

Di sinilah kiranya perlu dirumuskan sistem pendidikan yang non komersil, berorientasi pada masa depan bangsa sehingga fungsi pendidikan sebagaimana termaktub dalam undang-undang 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak sia-sia. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melahirkan sumber daya manusia yang dinamis, produktif dan kreatif⁹.

Pertama, pendidikan yang demokratis, yakni pendidikan yang di dalamnya terjadi proses saling belajar antara guru dan murid, antara dosen dan mahasiswa. Di antara dosen dan mahasiswa terjadi hubungan relasi bukan pakar-non pakar. Di antara guru dan murid terjadi hubungan saling belajar bukan hubungan antara tuan dan budak yang bersifat diktator. Di dalam pendidikan yang demokratis terdapat adanya penghargaan dan penghormatan atas keragaman siswa dengan segala kreativitasnya. Seringkali kita temui di dalam proses belajar-mengajar di mana seorang guru mendikte anak didiknya untuk melakukan A, B, C dan D. Lantas ketika anak didik memiliki pendapat atau cara berbeda Guru bukannya mengapresiasi inovasi siswa melainkan mengatakan, "Kok tidak sama dengan cara yang tadi Bapak/Ibu jelaskan? Ayo dibenarkan!" Kondisi demikian sama sekali tidak menggambarkan pola pendidikan yang demokratis.

Dengan pola pendidikan yang memasung kreativitas, akan membentuk pribadi anak didik yang berpikir sempit, sehingga anak

⁹ Ibid, 278-282

didik tidak akan mampu menjadi sosok dengan cakrawala berpikir yang luas alias *one open minded*. Menjadi guru yang tidak selalu beranggapan bahwa dirinya yang paling tahu dan paling benar akan membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian untuk menyampaikan pendapat pribadinya terlepas dari penilaian apakah pendapat tersebut salah atau benar.

Kedua, pendidikan dialogisme. Tentang pendidikan dialogisme akan sangat tepat diterapkan dalam dunia pendidikan perguruan tinggi. Proses pembelajaran tidak menggunakan komunikasi satu arah di mana dosen berceramah dan mahasiswa bersikap pasif dengan hanya duduk manis mendengarkan tanpa ada proses dialektis. Komunikasi bersifat interaktif dengan sistem monolog disertai dengan diskusi di akhir, seminar dan debat sangat ditekankan, karena usia mahasiswa merupakan saat untuk menumbuhkembangkan kemampuan kritis, kemampuan argumentatif, dan kemampuan analitis. Dengan demikian, mahasiswa dapat berperan dalam proses menuju pemahaman yang lebih mendalam.

Ketiga, pendidikan desentralistik, yakni pendidikan yang berangkat dari *local genius*, ciri lokal, atau muatan lokal, di mana potensi lokal diberikan porsi lebih banyak dibanding materi yang lain. Disesuaikan dengan kebijaksanaan otonomi daerah, maka visi, misi, arah, tujuan, bentuk, kurikulum dan metode pendidikan disesuaikan dengan potensi daerah setempat dengan pertimbangan proyeksi pengembangannya ke depan.

Pendidikan kita hari ini justru menjauhkan anak daerah dari beragam potensi yang ada di daerah masing-masing. Sebagai contoh, di sebuah desa dengan pertanian sebagai

potensi utamanya, bukannya diperkenalkan bagaimana kondisi pertanian hari ini, apa permasalahannya, bagaimana mengatasi problematika tersebut, siswa justru diintervensi dengan paradigma buruk tentang betapa nestapanya nasib petani, hidup dalam serba kekurangan, segalanya sulit, harus berjemur di bawah terik matahari, berkotor-kotor karena bergelut dengan tanah, rumput, dan semacamnya.

Paradigma demikian membuat siswa enggan dengan dunia pertanian, mereka kian dijauhkan dari apa yang menjadi potensi utama daerah mereka demi iming-iming kemapanan kehidupan. Dalam benak mereka terpatri, bahwa untuk dapat hidup enak dan mapan harus menjadi pegawai, PNS kalau bisa sehingga gaji setiap bulan terjamin bahkan saat pensiun. Saat menempuh pendidikan tinggi di kota, mereka tak lagi ingat untuk kembali ke desa dan melakukan perbaikan-perbaikan yang kiranya memerlukan intelektualitas, tenaga, dan waktunya.

Keempat, pendidikan proaktif. Pendidikan yang mendidik anak bangsa menjadi insan pemberani, berpandangan jauh ke depan demi kemaslahatan umat. Berani menghadapi berbagai tantangan di dunia yang kian pesat berkembang, mencari dan mengambil peluang dalam setiap momen disertai dengan kematangan diri, bermental *avant-garde*, berani memasuki ketidakpastian (chaos), berani menciptakan ketidakberaturan (disorder), mempunyai inisiatif, bermental mandiri, tidak menggantungkan diri pada kerja, mempunyai motivasi untuk berprestasi.

Kelima, pendidikan berorientasi pengetahuan/produk. Anak didik diarahkan untuk memiliki motivasi tinggi dalam mencari pengetahuan dalam mengembangkan

sesuatu yang baru, bukan mencari status atau tiket untuk dapat bekerja.

Keenam, pendidikan alternatif¹⁰. Sebuah pendidikan yang memberikan peluang dan ruang untuk dapat berkembangnya aspek pluralitas, baik dalam ideologi, bentuk, strategi dan metodenya.

Relevansi Pendidikan Pesantren

Nilai-nilai yang harus ada dalam pendidikan masa depan sebagaimana digagas Yasraf sesungguhnya telah ada di dunia pendidikan pesantren. Mastuhu dalam bukunya yang berjudul Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, 1994 menjelaskan empat prinsip pendidikan di pesantren. Pertama, prinsip mencari kebijaksanaan. Dengan prinsip ini, santri diajak untuk sadar akan tanggung jawabnya di tengah kehidupan bermasyarakat. Kedua, prinsip bebas terpimpin, di sini anak didik belajar secara mandiri dan ustaz berperan sebagai pembimbing. Ketiga, prinsip *self government*, merupakan prinsip yang mengajari santri untuk mengorganisir diri sendiri, mengatur kehidupan sehari-hari selama di pesantren. Keempat, *prinsip kolektivisme*, prinsip yang mendidik santri untuk tidak semata-mata mementingkan diri sendiri, namun meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri.

Pada tahun 1930-an Soetomo menganjurkan agar asas-asas sistem pendidikan pesantren digunakan sebagai dasar pembangunan pendidikan nasional

Indonesia¹¹. Hal ini dikarenakan pendidikan pesantren mengandung ruh atau spiritualitas moral.

Hasbullah turut mendukung dengan pernyataannya, bahwa sistem pendidikan di dunia pesantren memiliki keunikan dibanding pendidikan pada umumnya, beberapa keunikan tersebut di antaranya:

1. Memakai sistem tradisional dengan kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dan kiai.
2. Kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problem non kurikuler mereka.
3. Para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu perolehan gelar dan ijazah, karena sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah, sedangkan santri dengan ketulusan hatinya masuk ke pesantren tersebut meski tanpa adanya ijazah. Hal itu karena demi mencari ridlo Allah swt semata.
4. Sistem pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme persaudaraan, persamaan, percaya diri dan keberanian hidup. Alumniinya tidak ingin menduduki posisi pemerintahan sehingga mereka hampir tak bisa dikuasai oleh pemerintah.¹²

Keunikan pesantren tersebut tidak hanya didapati dalam pendekatan pembelajarannya yang digunakan, namun juga dalam pandangan hidup dan tatanan nilai yang dianut¹³. Dulu,

10 Paulo Freire (et.al). 1999. *Menggugat Pendidikan Fundamentalisme, Konservatisme, Liberal, Anarkis*. Pustaka Pelajar.

11 Nurcholis Madjid. *Bilik-bilik Pesantren*. Hal.112

12 Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hal. 141

13 Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, hal. 28

sebelum pendidikan sekolah masuk ke Nusantara, figur seorang kiai menjadi tokoh utama dalam dunia pendidikan pesantren oleh karena kiai mencerminkan ketinggian ilmu agama, luasnya pengalaman, darah biru, kaya dan “sakti” sehingga kedudukan kiai sebagai sentral sistem menjadi sangat efektif.¹⁴

Pusat perhatian sistem pendidikan pesantren kuno lebih pada mendidik santri agar menjadi *insan al-kamil* dan sama sekali belum menghubungkan dengan konsep pasar tenaga kerja. Sosok kiai pengasuh pesantren sekaligus berperan sebagai “kurikulum” dari pesantrennya. Hal ini dimaksudkan bahwa program utama akademik pesantren ditentukan oleh klasifikasi keahlian yang dimiliki sang kiai. Sebagai misal, jika kiainya ahli ilmu fiqh maka ilmu yang paling dominan dikaji adalah ilmu fiqh sehingga diperoleh pemahaman secara mendalam dan tuntas. Prinsip demikian sesungguhnya sangat modern, seperti yang berlaku di universitas-universitas terkenal di barat, yakni pembukaan suatu program studi tergantung ada tidaknya guru besar dari cabang keilmuan tersebut¹⁵, tidak seperti di Indonesia yang lebih suka memaksakan diri tanpa melihat sumber daya pendidik yang ada sehingga kondisi pendidikannya keteteran, tertatih dan merangkak.

Namun hari ini, kelemahan mayoritas pesantren justru terletak pada figur kiai, baik dari aspek keilmuan, “keanggunan kepribadian” maupun distorsi lingkungan¹⁶. Hal senada disampaikan pula oleh Nawawi bahwa pesantren-pesantren yang dulu pernah mengalami kejayaan, sebagian mengalami

14 Mubarok, *Psikologi Islam*, hal 247

15 *Ibid*, hal. 248

16 *Op. cit*, hal. 250

kesurutan sejarah karena regenerasi para kiainya tidak disiapkan dalam pengkaderan serius. Sementara arus sedemikian kuat terhadap pesantren, justru dunia pesantren tertantang untuk menjawab problematika pendidikan di masyarakat¹⁷.

Melihat peranan penting pesantren di masa depan, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan agar pendidikan pesantren relevan dengan situasi dan kondisi dewasa ini, di mana kita hidup dalam dunia global dengan segala tawaran menggiurkan di dalamnya, sebab pesantren merupakan alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu sendiri (*people centered development*) dan sekaligus sebagai pusat pengembangan pembangunan yang berorientasi pada nilai (*value oriented development*)¹⁸.

Daftar Pustaka

- Mubarok, Achmad. 2009. *Psikologi Islam Kearifan & Kecerdasan Hidup*. Jakarta: The IIIT dan WAP
- Departemen Agama RI. 2003. *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
- Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. 2005. *Desain Pengembangan Madrasah*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Hasbullah. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

17 Nawawi, *Sejarah dan Perkembangan Pesantren*, hal. 6

18 Nur Cholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, hal. xxi

- Madjid, Nurcholis. 1997. *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina
- Freire, Paulo (et.al). 1999. *Menggugat Pendidikan Fundamentalisme, Konservatisme, Liberal, Anarkis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yasraf Amir Piliang. *Transpolitika Dinamika Politik di Era Virtualitas*. 2005. Yogyakarta: Jalasutra
- Nawawi. 2006. *Sejarah dan Perkembangan Pesantren dalam Jurnal Ibda'* Vol. 4 No. 1 Jan-Jun
http://www.dikti.go.id/?page_id=68&lang=id diakses pada, Senin 23 September 2013 pukul 11: 41 WIB